

# Berkas Peristiwa Jambo Keupok Dilimpahkan ke Kejaksaan

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelesaikan berkas dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Jambo Keupok, Aceh. Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM di Aceh, Otto Nur Abdullah, mengatakan ini adalah kasus pertama di Aceh yang berkasnya berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Peristiwa Jambo Keupok terjadi pada 17 Mei 2003, tepatnya sehari sebelum darurat militer disahkan

oleh Presiden Megawati Sukarnoputri. Tragedi ini merupakan bagian dari operasi TNI yang mencari anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan. Saat itu, anggota TNI memasuki setiap rumah di desa tersebut. Mereka memeriksa seluruh tempat, memaksa para penghuni keluar rumah, dan memisahkan antara perempuan, laki-laki, dan anak-anak.

“Hasil penyelidikan

menunjukkan ada bukti permulaan yang cukup untuk mengidentifikasi ini adalah pelanggaran HAM berat,” kata Otto di kantornya, kemarin. Bukti-bukti itu antara lain penemuan 12 orang yang tewas karena dibakar hidup-hidup, 4 tewas ditembak, dan 23 orang disiksa agar memberi informasi soal keberadaan anggota GAM.

Sekretaris Tim Ad Hoc Jambo Keupok, Sriyana, mengatakan tim penyelidik baru terbentuk pada akhir

2013 dan efektif bertugas pada tahun berikutnya. “Letaknya terpencil dan tidak ada media massa yang meliput,” kata dia. Selama penyelidikan, Komnas HAM memeriksa 17 penduduk Desa Jambo Keupok yang mengalami kejadian itu. Meski sudah lama, anak-anak kecil yang kini sudah dewasa masih ingat betul peristiwa tersebut.

Tak hanya warga sipil, Komnas HAM juga memanggil camat dan sekretaris desa untuk dimin-

tai keterangan. Namun Komnas HAM kesulitan memanggil saksi-saksi dari anggota TNI yang mengeksekusi. “Sudah dipanggil tiga kali, mereka tak mau datang,” kata Sriyana.

Otto mengatakan, sulitnya memanggil pihak militer membuat penyelidikan kasus ini tersendat. “Kami tak punya kekuatan untuk memanggil paksa mereka,” ujarnya. Padahal, Otto melanjutkan, Komnas HAM sudah mencari nama-nama anggota TNI yang saat itu

ada di lapangan hingga ke Markas Besar TNI.

Kejaksaan belum bisa dimintai konfirmasi ihwal pelimpahan berkas dugaan pelanggaran HAM berat Jambo Keupok ini. Sambungan telepon dan pesan pendek yang *Tempo* sampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Amir Yanto, tak berbalas.

● MAYA AYU PUSPITASARI | DEWI SUCI

RAHAYU